

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

2021, Sistem Jalan Berbayar Gantikan Aturan Ganjil-Genap

Sistem ERP akan diperluas ke 25 ruas jalan yang menerapkan aturan ganjil-genap pelat nomor kendaraan.

Inge Klara Safitri

inge.klara@tempo.co.id

JAKARTA — Pemerintah DKI Jakarta berencana menerapkan sistem jalan berbayar elektronik alias *electronic road pricing* (ERP) di sejumlah ruas jalan pada 2021. Kepala Dinas Perhubungan, Syafrin Liputo, mengatakan sistem ERP bakal menggantikan aturan ganjil-genap pelat nomor kendaraan secara permanen.

Pemerintah DKI, menurut Syafrin, akan mengkaji ulang proyek ERP yang sebelumnya direncanakan diterapkan di sejumlah ruas jalan di Ibu Kota. "Kami harap proses kajian rampung pada awal 2020," kata Syafrin, kemarin.

Dalam kajian baru itu, Syafrin menambahkan, pemerintah DKI akan mengidentifikasi jalan-jalan yang bisa menerapkan aturan ganjil-genap. Prioritasnya adalah jalan-jalan yang telah menerapkan ganjil-genap. Saat ini, aturan ganjil-genap berlaku di 25 ruas jalan di Ibu Kota.

Pemerintah Jakarta juga akan mengkaji lagi tekno-

logi ERP. Prioritasnya, menurut Syafrin, adalah teknologi terbaru ERP dengan fitur yang sesuai dengan kebutuhan jalan di Jakarta. "Termasuk teknologi yang bisa langsung menghitung berat muatan," kata dia.

Setelah kajian rampung, menurut Syafrin, pemerintah DKI akan langsung mengurus semua persyaratan dan dokumen proyek ERP. Selanjutnya, pemerintah Jakarta akan segera menggelar lelang proyek. "Sehingga pada 2021, sistem ERP bisa mulai diterapkan," kata Syafrin.

Rencana pemberlakuan sistem ERP di Jakarta dirintis sejak 2005. Uji coba sistem jalan berbayar juga pernah digelar di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Rasuna Said pada 15 Juli 2014. Uji coba dilakukan oleh dua perusahaan berbeda. Di Jalan Sudirman, uji coba dilakukan oleh Kapsch, perusahaan asal Swedia. Adapun di Jalan Rasuna Said, uji coba dilaksanakan oleh Q-free, perusahaan

asal Norwegia. Uji coba di kedua jalur itu berlangsung hingga Desember 2014.

Namun lelang proyek ERP tak berjalan mulus. Awalnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mempersoalkan lelang. Belakangan, Kejaksaan Agung juga memberi pendapat hukum bahwa proses lelang harus diulang.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah mengatakan tak mau memaksakan penerapan ERP jika memang dinilai bermasalah. "Lebih penting membangun transportasi umumnya daripada ERP-nya," ujar Anies, Januari lalu.

Proses lelang akhirnya dihentikan. Pemerintah DKI Jakarta pun mencoret anggaran proyek ERP senilai Rp 40,9 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan DKI 2019. ●